



**RENCANA KERJA
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SUMATERA
(P3ES)
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

OLEH :

**LAURA PAULINA BMA, S.Si, MSc
KEPALA BAGIAN TATA USAHA**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION SUMATERA (P3ES)**

PERAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL



PRODUKSI PANGAN BELUM MEMCUKUPI KEBUTUHAN MASYARAKAT

TINGGINYA JUMLAH PENDERITA ISPA KARENA KUALITAS UDARA MENURUN

TINGGINYA FREKUENSI BANJIR DAN TANAH LONGSOR

KUALITAS AIR DI BERBAGAI SUNGAI SEMAKIN TURUN

KETERSEDIAAN AIR SEMAKIN SEDIKIT UNTUK Mendukung KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

JUMLAH WISATAWAN KE INDONESIA SANGAT SEDIKIT DIBANDINGKAN NEGARA ASEAN LAINNYA

TINGGINYA RESIKO KESEHATAN (KANKER) AKIBAT PAPAN LOGAM BERAT

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MARJINAL YANG MASIH RENDAH

MASALAH PEMBANGUNAN YANG INGIN DISELESAIKAN DI TINGKAT NASIONAL

PRODUKSI HASIL HUTAN BELUM MAMPU MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

TINGGINYA KERUSAKAN HUTAN AKIBAT LUASNYA HUTAN OPEN ACCESS YANG TIDAK DIKELOLA

PRODUKSI PANGAN & ENERGI BELUM MEMCUKUPI KEBUTUHAN MASYARAKAT

TINGGINYA ANCAMAN KEPUNAHAN SPESIES YANG MENYEBABKAN KEKAYAAN HAYATI TURUN,

TINGGINYA KERUGIAN NEGARA AKIBAT HAK-HAK NEGARA HILANG ATAS KEBERADAAN SD




TUJUAN

MEMASTIKAN KONDISI LINGKUNGAN BERADA PADA TOLERANSI YANG DIBUTUHKAN UNTUK KEHIDUPAN MANUSIA, DAN SUMBERDAYA BERADA PADA RENTANG POPULASI YANG AMAN, SERTA SECARA PARALEL MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK MEMBERIKAN SUMBANGAN BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL.

2019

15 DAS, 429 KPH dan 50 Taman nasional serta peningkatan akses masyarakat telah dapat diartikulasikan sebagai dukungan kemnterian terhadap pembangunan nasional yang ditunjukkan dengan pencapaian 3 sasaran strategis pada tingkat nasional

2018

15 DAS sudah mampu memberikan gambaran dukungan ketahanan air, 329 KPH yang dioperasikan tahun 2016-2017 dan 50 Taman Nasional mampu memberikan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan dukungan terhadap akselerasi pembangunan ekonomi nasional. Hutan yang dikelola masyarakat sudah memberikan keyakinan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produksi hasil hutan

2017

15 DAS mampu memberikan gambaran peningkatan kualitas DAS, 229 KPH yang dioperasikan di tahun 2016 mulai memberikan gambaran penurunan degradasi hutan, peningkatan produksi hutan, IKLH berangsur naik di setiap anasir. Sebagian luas hutan yang dikelola masyarakat sudah mulai terlihat perbaikannya dan konflik tenurial mulai berkurang

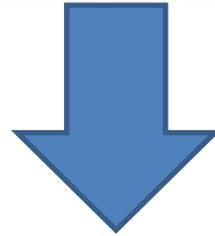
2016

Perbaikan lingkungan secara nyata di 15 DAS, Setidaknya 229 KPH mulai diintervensi secara langsung, 20 taman nasional sudah memiliki pusat *sanctuary* sebagai dasar peningkatan populasi 25 spesies terancam punah, Penyiapan modal sosial untuk peningkatan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat

2015

Reorganisasi selesai di triwulan II, persiapan peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan seluas 12,7 juta ha, serta persiapan dan pelaksanaan reformasi agraria dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berupa legalisasi aset seluas 0,6 juta ha dan redistribusi tanah seluas 3,5 juta ha

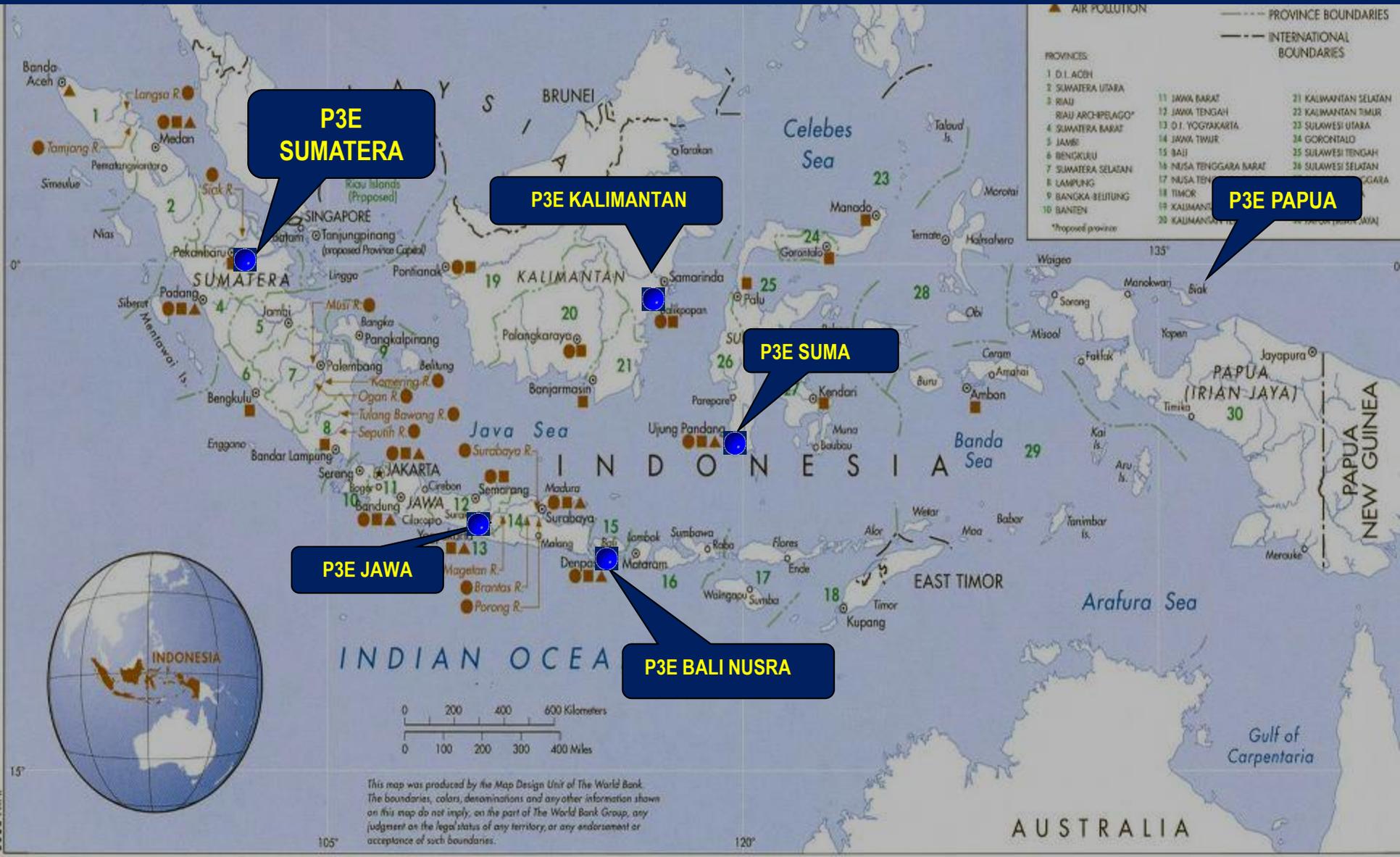
**PUSAT PENGELOLAAN
EKOREGION SUMATERA**



**PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION SUMATERA**

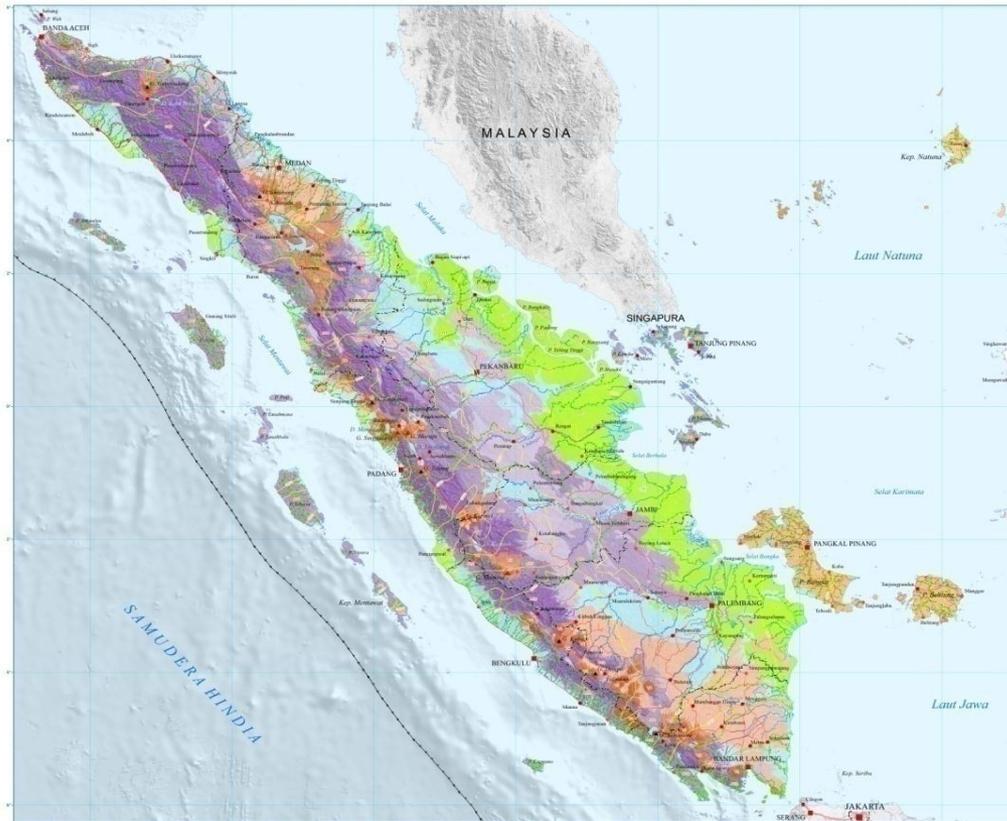


KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION DI INDONESIA



GAMBARAN UMUM SUMATERA

PETA EKOREGION PULAU SUMATERA



KETERANGAN

- Ibukota Negara
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Kota lain
- Gunung
- ▲ Gunung berapi aktif
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Batas lempeng tektonik
- Batas Provinsi
- Batas DAS
- Sungai
- Danau / Waduk
- Batas lempeng tektonik
- Garis isohyet dan Nisbi curah hujan (dalam mm / tahun)

EKOREGION

- Dataran Marin Sumatera
- Dataran Organik/Gambut Sumatera
- Dataran Fluvial Sumatera
- Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung - Natuna
- Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan
- Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan
- Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung - Natuna
- Perbukitan Struktural Kompleks Mentawai
- Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan
- Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Riau
- Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan
- Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan
- Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan

Riwayat Peta :
Peta Ekoregion ini disusun berdasarkan konsep tentang lahan dengan penekanan morfologi dan genesis, yang dimigrasikan dengan peta iklim (curah hujan tahunan) dan prediksi tipe vegetasi berdasarkan interpretasi elevasi kontur dan tipe iklim Schmidt Ferguson. Informasi morfologi diperoleh dari hasil interpretasi kemampuan shading relief DEM SRTM 30 meter, dengan menggunakan referensi peta sistem lahan, sedangkan informasi genesis diperoleh dari hasil analisis proses geomorfologi yang merupakan alat awal dalam rangka bertumbuhnya bertumbuh dengan menggunakan referensi Peta Geomorfologi Indonesia dari ITC tahun 1999. Peta Ekoregion Pulau Sumatera telah dilakukan validasi tahun 2013.

SKALA 1 : 2.000.000



- Sumber Peta :**
1. Peta Raster Indonesia Skala 1 : 250.000, Bakosurtanal
 2. Peta Sistem Lahan Skala 1 : 250.000 Tahun 1987-1988 RePPH0T, Bakosurtanal
 3. Peta Geomorfologi Indonesia skala 1:5.000.000 tahun 1999 ITC
 4. Peta Curah Hujan Rata-rata Tahunan (1981 - 2010), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 5. Peta Geologi Indonesia skala 1:5.000.000 tahun 1996, PPGP, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Peta Batas DAS (Daerah Aliran Sungai) tahun 2008, Kementerian Kehutanan
 7. DEM SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) 30 meter tahun 1999 - 2000 dan TOPO 1 versi 2.0

Geografi

Lokasi	Asia Tenggara
Koordinat	0°00' LU 102°00' BT
Kepulauan	Kepulauan Sunda Besar
Luas	470.000 km ²
Ketinggian tertinggi	3.805 m
Puncak tertinggi	Kerinci

Provinsi [10 Provinsi](#)

Jumlah Kab/kota [154 Kab/kota](#)

Demografi

Populasi 54.23 juta jiwa (per 2012)

Kepadatan 97/km²

Kelompok etnik [Aceh](#), [Batak](#), [Minangkabau](#), [Melayu](#), [Rejang](#)

SASARAN STRATEGIS 2015-2019

NASIONAL

MENJAGA KUALITAS LH
untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat

MEMANFAATKAN POTENSI SD HUTAN DAN LINGKUNGAN HUTAN secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

MELESTARIKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM dan keberagaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Indikator :

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berada pada kisaran 66,5 – 68,6

Peningkatan kontribusi SD hutan dan LH terhadap devisa dan PNB

Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun
Penanda : penurunan hotspot, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon

P3E SUMATERA

SASARAN
MENINGKATNYA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION SUMATERA

IKK

1. % Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK di Ekoregion Sumatera
2. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan LHK berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sumatera selama 5 tahun

Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
80 %	85%	90%	90%	95%
1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SUMATERA (P3ES) BERDASARKAN PERMENLHK NO. 18 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KLHK

- **Pasal 1518**

dinyatakan bahwa P3E mempunyai tugas **melaksanakan penyelenggaraan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.**

- **Pasal 1519**

dinyatakan bahwa P3ES, mempunyai fungsi, yaitu :

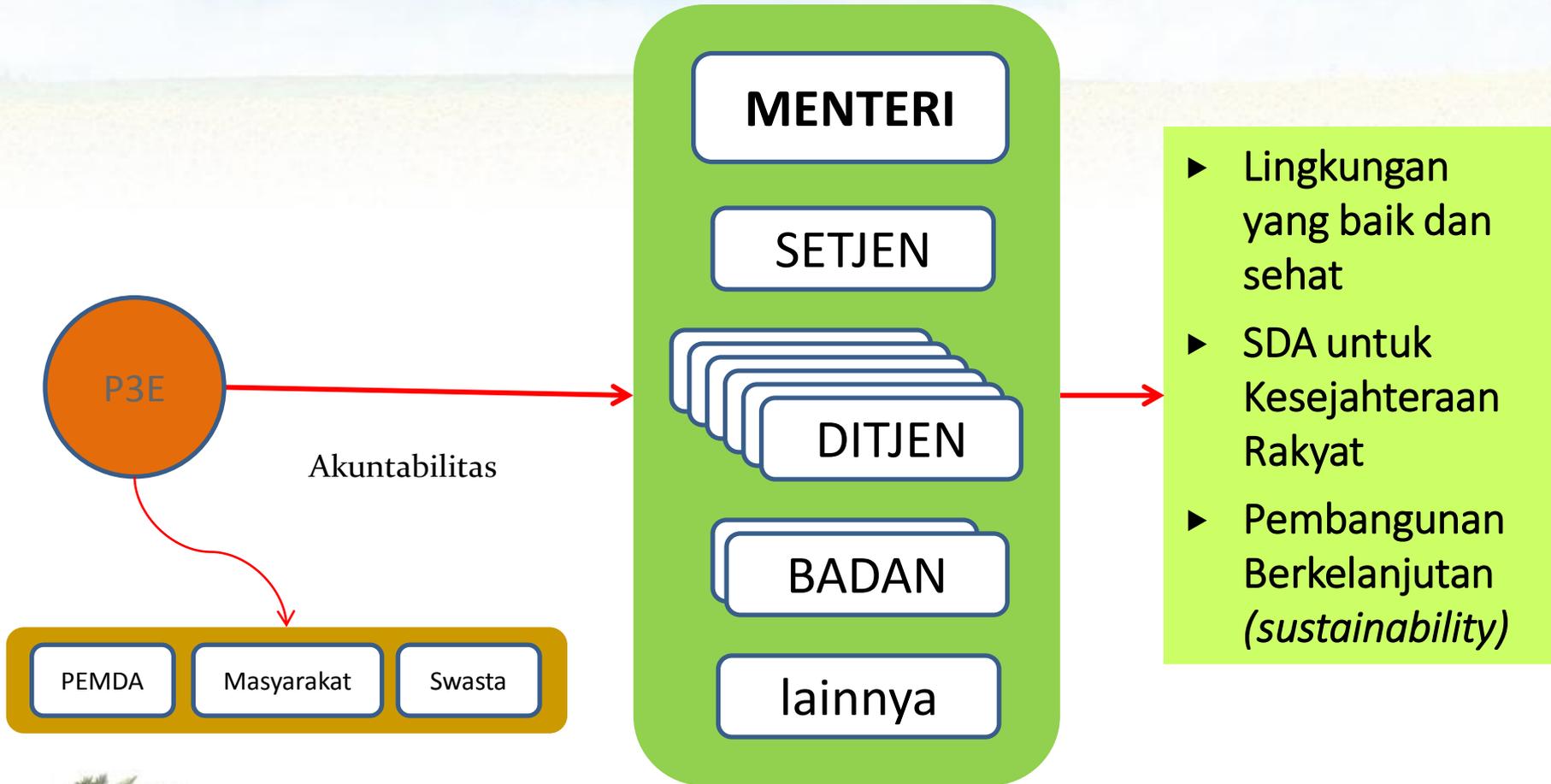
- ❖ Menyusun kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion
- ❖ Melaksanakan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion
- ❖ Melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion
- ❖ Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion
- ❖ Mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat



Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan inventarisasi DDDT SDA dan LH, serta pelaksanaan perencanaan SQDA dan LH dilaksanakan berdasarkan 9 sektor pembangunan



PERAN STRATEGIS P3E



Program ke-13 (Setjen), yaitu : Dukman dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KLHK
Kegiatan (K 13) : Pengendalian Ekoregion Sumatera

TANTANGAN UTAMA

- MENDORONG PERBAIKAN ADMINISTRASI SEIRING PERBAIKAN TAPAK
- KETERKAITAN LINTAS PROGRAM

ISU	STRATEGI
Perencanaan	Membawa hasil lapangan pada perencanaan dan penganggaran
Eksekusi target	Mendayagunakan UPT, dengan Pusat Ekoregion sebagai pengendali
	Menata dekon dan DAK
Entitas yang akan diukur	KPH, DAS dan taman nasional
Mekanisme pengukuran	Numerik dan spasial
	Membangun dan menyepakati mekanisme 3 bulanan dengan ukuran yang lebih riil di lapangan
	Kodefikasi untuk seluruh sasaran berbasis <i>logic model</i>

- **Tujuan pengendalian pembangunan di ekoregion Sumatera**

yaitu : memastikan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Sumatera berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

- **Peran dan tanggung jawab P3E Sumatera Dalam Renstra Sekjen:**

- (1) *extended value chain* bagi KLHK di ekoregion Sumatera khususnya dalam peningkatan kapasitas *stakeholders* di daerah;
- (2) mempertajam dan merampingkan implementasi kegiatan dengan memfokuskan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dengan demikian maka pencapaian target sasaran strategis dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien
- (3) mendorong pelaksanaan teknis di lapangan kepada instansi di provinsi/kabupaten/kota dan
- (4) mengkoordinasikan perencanaan dan evaluasi pencapaian sasaran strategis KLHK kepada seluruh UPT/Satker KLHK di ekoregion Sumatera.



Sasaran Kegiatan dan Unit Kegiatan di P3E Sumatera

Kegiatan **Pengendalian Ekoregion Sumatera** “Meningkatnya Pengendalian Pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Sumatera”, **indikator kinerja**, yaitu:

- Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sumatera 95%.
- Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sumatera selama 5 tahun.
- Untuk mencapai indikator kinerja yang ke-1, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan UPT KLHK dan Pemda.
- Untuk mencapai indikator kinerja yang ke-2, perlu ditetapkan 8 isu strategis di Ekoregion Sumatera.



Tema/Isu Strategis Sebagai Pekerjaan P3E Sumatera Tahun 2015 - 2019

No	Isu Strategis	Lokus
1	Kerusakan Ekosistem Gambut	Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi
2	Pencemaran dan Kerusakan DAS	Musi, Siak, Kampar, Asahan Toba, Way Seputih
3	Pencemaran dan Kerusakan Danau	Danau Singkarak, Maninjau, Kerinci
4	Pencemaran dan Kerusakan SDA dan LH Pesisir dan Laut	Pesisir Timur Sumatera (Riau, Jambi, Sumsel, Aceh dan Sumut)
5	Pulau-pulau kecil	Kepulauan Babel dan Kepri
6	Kualitas Lingkungan Perkotaan	Medan, Palembang, Batam dan Pekanbaru
7	Kerusakan Ekosistem Karst	Sumatera Barat dan Aceh
8	Koridor Kawasan Strategis Nasional	Sumbar, Riau, Jambi



Arah Kegiatan P3E Sumatera dalam Renstra P3E Sumatera Tahun 2015 – 2019

- Unit Kegiatan Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung (UK1)

Elemen Kegiatan/ Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1. Inventarisasi DDDT Hutan dan Hasil Hutan (EK1)							
a. Data DDDT hutan dan hasil hutan tersedia	Jumlah data DDDT hutan dan hasil hutan yang tersedia	Dokumen	1	2	3	4	5
b. Provinsi/kabupaten/ kota menyusun DDDT Sektor Kehutanan	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan DDDT hutan dan hasil hutan	Provinsi dan Kab/Kota	1	2	5	8	11
			1	1	1	2	3
2. Inventarisasi DDDT Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan (EK 2)							
a. Data DDDT ekosistem tematik sektor pertambangan, energi, pertanian dan kelautan tersedia	Jumlah data DDDT ekosistem tematik sektor pertambangan, energi, pertanian dan kelautan yang tersedia	Dokumen	1	2	3	4	5
b. Provinsi/kabupaten/ kota menyusun DDDT SDA dan LH sektor pertambangan, energi, pertanian dan kelautan	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan DDDT SDA dan LH sektor pertambangan, energi, pertanian dan kelautan	Provinsi dan Kab/Kota	1	2	5	8	12
			1	1	2	2	3
3. Inventarisasi DDDT Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa (EK3)							
a. Data DDDT ekosistem tematik sektor Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa tersedia	Jumlah data DDDT ekosistem tematik sektor Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa yang tersedia	Dokumen	1	2	3	4	5
b. Provinsi/kabupaten/ kota menyusun DDDT SDA dan LH sektor Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan DDDT SDA dan LH sektor Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa	Provinsi dan Kab/Kota	1	2	5	9	12
			1	1	2	3	3

Unit Kegiatan Penyusunan dan Penerapan Rencana Pengelolaan SDA dan LH (UK2)

Elemen Kegiatan/ Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1. Perencanaan dan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan							
a. Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH pada sektor hutan dan hasil hutan berbasis DDDT	Jumlah rencana pengelolaan SDA dan LH sektor hutan dan hasil hutan berbasis DDDT	Dokumen	1	1	2	3	4
b. Penerapan Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH pada sektor hutan dan hasil hutan berdasarkan DDDT dan instrumen LHK lainnya oleh stakeholder	Jumlah stakeholder yang menerapkan rencana pengelolaan SDA dan LH pada sektor hutan dan hasil hutan berdasarkan DDDT dan instrumen LHK lainnya	Institusi	0	1	2	3	4
2. Perencanaan dan Pengelolaan Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan							
a. Perencanaan pengelolaan SDA dan LH pada sektor Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan berbasis DDDT)	Jumlah rencana pengelolaan SDA dan LH pada sektor Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan berbasis DDDT	Dokumen	1	3	4	5	6
b. Penerapan rencana pengelolaan SDA dan LH pada sektor Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan berdasarkan DDDT dan instrumen LHK lainnya oleh stakeholder	Jumlah stakeholder yang menerapkan rencana pengelolaan SDA dan LH sektor Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan berdasarkan DDDT dan instrumen LHK lainnya	Institusi	0	2	4	6	8
3. Perencanaan dan Pengelolaan Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa							
a. Perencanaan pengelolaan SDA dan LH pada sektor transportasi, manufaktur, industri dan jasa di ekoregion Sumatera berbasis DDDT	Jumlah rencana pengelolaan SDA dan LH pada sektor transportasi, manufaktur, industri dan jasa berbasis DDDT	Dokumen	1	2	5	9	14
b. Penerapan rencana pengelolaan SDA dan LH pada sektor transportasi, manufaktur, industri dan jasa berdasarkan DDDT dan instrumen LHK lainnya oleh stakeholder	Jumlah stakeholder yang menerapkan rencana pengelolaan SDA dan LH sektor transportasi, manufaktur, industri dan jasa berdasarkan DDDT dan instrumen LHK lainnya (Institusi	12	15	19	24	30

Unit Kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan LH (UK3)

Elemen Kegiatan/ Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1. Evaluasi Pengelolaan SDA dan LH							
Terlaksananya evaluasi pelaksanaan sasaran strategis KLHK di ekoregion Sumatera	Persentase unit kerja KLHK yang mendukung capaian sasaran strategis KLHK	Persen	10	25	50	60	80
	Jumlah pemda yang dievaluasi capaian sasaran strategis KLHK	Provinsi dan Kab/Kota	6 4	8 22	9 51	10 80	10 110
2. Uji Kualitas Lingkungan							
Tersedianya data IKLH yang up to date dan dipublikasikan	Jumlah data IKLH terbaru yang dipublikasikan	Data dan Provinsi	3 10	3 10	3 10	3 10	3 10
	Jumlah laboratorium daerah yang mampu menghasilkan data kualitas air dan udara yang sesuai dengan metode standar	Lab Kab/Kota	20	35	50	65	80
	Jumlah parameter analisis yang terakreditasi oleh KAN di Laboratorium P3E Sumatera	Parameter kualitas lingkungan	12	12	17	22	27
3. Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan LH							
a. Target tahunan IKLH tercapai di Ekoregion Sumatera	Jumlah Pemda di Sumatera yang difasilitasi pencapaian target IKLH	Kab/kota	5	10	15	20	25
b. Peningkatan peran serta stakeholder dalam mencapai sasaran strategis KLHK	Jumlah stakeholder yang meningkat peran sertanya dalam mendukung tercapainya sasaran strategis KLHK	Institusi	5	10	15	20	25

KEGIATAN P₃E LOKUS PROVINSI RIAU TAHUN 2015

• **KAJIAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN SUNGAI SIAK**

Tujuan :

- ❖ Mengetahui Sumber Pencemar di Sepanjang Sungai Siak
- ❖ Menghitung Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Siak

Hasil :

- ❖ Teridentifikasi Sumber Pencemar di Sepanjang Sungai Siak
→ Perkebunan (Kab.Siak,Kampar,Bengkalis, Rohul) dan limbah domestik (Kota Pekanbaru)
- ❖ Diketuainya Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Siak
→ Segmen Kabupaten Kampar, Siak dan Kota Pekanbaru telah melebihi daya tampung (137,929 kg/perhari)

Manfaat :

- ❖ **Bahan masukan/rekomendasi** bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pengambilan keputusan bagi kebijakan peruntukan air Sungai dan DAS Siak

Hasil Rekomendasi Kajian Data Tampung Beban Pencemaran Sungai Siak

Program Pengendalian Pencemaran Air

- Pengolahan limbah berbasis masyarakat
- Relokasi pemukiman pinggir sungai
- IPAL komunal
- Ekoefisiensi limbah sektor UKM
- Optimalisasi pengawasan izin pembuangan limbah
- Optimalisasi pestisida organik

Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan

- Reboisasi
- Rehabilitasi ekosistem riparian
- Agroforestri
- Check DAM
- Sumur resapan dan biopori
- Penertiban bangunan sempadan dan bantaran sungai

Program Peningkatan Peran Masyarakat

- Pelatihan biogas, kompos, dan IPAL sederhana
- Sosialisasi dan diseminasi sanitasi
- Optimalisasi forum DAS

Prioritas Program Pengendalian

Pengendalian pencemaran air limbah perkebunan

Pengendalian pencemaran air limbah pertanian

Pengendalian pencemaran air limbah peternakan

Pengolahan limbah rumah tangga

Pengendalian pencemaran air limbah institusi (industri, RS, hotel, restoran, dll)

➔ **Penyusunan Rencana Umum Pengendalian Lingkungan DAS Kampar Segmen Provinsi Riau**

Hasil : dokumen rencana umum pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan DAS Kampar Segmen Provinsi Riau yang memuat tentang strategi, arah kebijakan, tujuan program, kegiatan, indikator keberhasilan, jangka waktu, penanggungjawab dan instansi pendukungnya

➔ **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**

5 Kelompok MPA di Kab. Muaro Bungo

4 Kelompok MPA di Kab. Kepulauan Meranti

5 Kelompok MPA di Kab. Rokan Hilir

aktif mencegah karlahut di desa masing – masing

➔ **Peningkatan Kapasitas Bagi Sumber Pencemar**

17 hotel dan 48 rumah sakit (65 sumber pencemar) di sepanjang DAS Siak dan DAS Kampar berkomitmen melakukan pengelolaan lingkungan → untuk meningkatkan nilai IKLH di Sumatera



KEGIATAN

P3E SUMATERA TAHUN 2016

- 1. Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Sumber Daya Alam dan LH :**
 - a. Inventarisasi DDDT Kesatuan Hidrologis Gambut Di Riau
 - b. Inventarisasi DDDTPesisir Timur Sumatera (Prov Riau Dan Jambi)
 - c. Pembinaan Teknis Inventarisasi dan Penyusunan DDDT Jasa Ekosistem Sumberdaya Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan
 - d. Inventarisasi DDDT LH DAS Musi
 - e. Fasilitasi Penyusunan DDDT LH Berbasis Jasa Ekosistem

- 2. Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH di Ekoregion Sumatera :**
 - a. Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA Sumatera (Sektor Hutan dan Hasil Hutan)
 - b. Pertemuan Koordinasi dan Pertemuan Teknis Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH
 - c. Penyusunan Rencana Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Kampar Segmen Provinsi Sumatera Barat
 - d. Sosialisasi Dokumen Perencanaan Sektor Perkebunan dan Pertambangan
 - e. Penerapan Rencana Pengelolaan SDA dan LH melalui Instrumen Lingkungan
 - f. Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa

KEGIATAN

P3E SUMATERA TAHUN 2016

3. Evaluasi Pengelolaan SDA dan LH

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang LH dan Kehutanan

4. Uji Kualitas Lingkungan dalam Pengelolaan SDA dan LH

- a. Pemantauan Kualitas Lingkungan
- b. Peningkatan Kapasitas Laboratorium dan SDM dalam Pelaksanaan Uji Kualitas Lingkungan
- c. Optimalisasi Laboratorium P3ES dalam Menunjang Pemantauan Uji Kualitas Lingkungan

5. Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan LH

- a. Tindak Lanjut Program Strategis KLHK di Daerah
- b. Tindak Lanjut Pencapaian IKLH di Sumatera
- c. Tindak Lanjut Perapan Daya Dukung di Daerah (kemungkinan akan direvisi menjadi TL Operasionalisasi KPH di Sumatera)



RENCANA KERJA (RENJA) P3E SUMATERA YANG TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN TAHUN 2017

No	Program/Kegiatan	Indikator			Lokasi	Pihak Terkait	Sumber & Jumlah Anggaran (Rp)			
		Output Program/Kegiatan	Volume	Satuan			APBN			
							APBN	Dekon	DAK	TP/PH LN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program :									
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KLHK									
	Kegiatan :									
	Pengendalian Ekoregion Sumatera									
	Komponen Kegiatan :									
1	Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Kesatuan Hidrologis Gambut di Riau	Jumlah data DDDT hutan dan hasil hutan yang tersedia	3	Dokumen	Sumatera	- Labling - Perguruan Tinggi	v			
2	Pembinaan Teknis Penyusunan DDDT SDA dan LH Penanganan Karlahut	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan DDDT hutan dan hasil hutan	5 1	Provinsi dan kab/kota	Sumatera	- Labling - Perguruan Tinggi	v			
3	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kelompok MPA yang aktif mencegah Karhutla	15	kelompok	Sumatera	- Masyarakat - BLH - Dishut	v			
4	Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA Sumatera (Sektor Hutan dan Hasil Hutan)	Jumlah rencana pengelolaan berdasarkan isu strategis hutan dan hasil hutan	2	Dokumen	Sumatera	- Dishut - BLH - Bappeda	v			
5	Pertemuan Teknis Bidang Kehutanan	Jumlah stakeholder yang menerapkan rencana pengelolaan berdasarkan isu strategis hutan dan hasil hutan	2	Institusi	Sumatera	- Dishut - BLH - Masyarakat	v			

No	Program/Kegiatan	Indikator			Lokasi	Pihak Terkait	Sumber & Jumlah Anggaran (Rp)			
		Output Program/Kegiatan	Volume	Satuan			APBN			
							APBN I	Dekon	DAK	TP/PHLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Evaluasi Pengelolaan LHK di Ekoregion Sumatera	Jumlah unit kerja KLHK yang dievaluasi capaian kinerja dan capaian Sasaran Strategis KLHK	20	Unit kerja	Sumatera	- UPT - BLH Prov - Dishut Provinsi - BLH Kab/kota - Dishut Kab/kota - Bakorluh Provinsi	v			
7	Tindak Lanjut Program Strategis KLHK di Daerah	Jumlah UPT di Sumatera yang dapat mencapai sasaran Strategis KLHK	20	UPT	Sumatera	- UPT KLHK	v			
8	Tindak Lanjut Penerapan Daya Dukung di Daerah	Jumlah kabupaten/kota di Sumatera yang melakukan penghitungan Daya Dukung Lingkungan dengan benar	10	Kab/kota	Sumatera	- BLH - Dishut	v			
9	Tindak Lanjut Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan (Air, Udara dan Tutupan Lahan) di Sumatera	Jumlah Provinsi di Sumatera yang dapat menghitung IKLH	20	Kab/kota	Sumatera	- BLH - UPT	v			

RENCANA PENGHITUNGAN DDDT DI EKOREGION SUMATERA TAHUN 2015 -2019

NO.	Isu Strategis	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kerusakan Ekosistem Gambut	-	Riau (Bengkalis)	Jambi	Sumsel	-
2	Pencemaran dan Kerusakan DAS	Siak	Musi	Asahan Toba	-	Way Sekampung
3	Pencemaran dan Kerusakan Danau	Danau Singkarak	-	Danau Toba	Danau Maninjau	-
4	Pencemaran dan Kerusakan SDA dan LH Pesisir dan Laut	-	Riau dan Jambi	Sumsel dan Lampung	Aceh dan SUMUT	-
5	Pulau-pulau kecil	Babel	-	-	Kepri	-
6	Kualitas Lingkungan Perkotaan	-	-	Palembang dan Batam	Pekanbaru	Medan
7	Kerusakan Ekosistem Karst	-	-	Sumbar	-	Aceh
8	Koridor Kawasan Strategis Nasional	Riau, Jambi, Sumbar	-	-	-	Riau, Jambi, Sumbar

PERANAN BIDANG KEHUTANAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS KLHK

NASIONAL

MENJAGA KUALITAS LH
untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat

MEMANFAATKAN POTENSI SD HUTAN DAN LINGKUNGAN HUTAN secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

MELESTARIKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM dan keberagaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Indikator Sasaran Strategis KLHK:

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berada pada kisaran 66,5 – 68,6.
Komponen IKLH : air, udara, **tutupan hutan**

Peningkatan kontribusi SD hutan dan LH terhadap devisa dan PNBP

Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun
Penanda : penurunan hotspot, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon

Peran Bidang Kehutanan

- Peningkatan tutupan hutan
- Peningkatan pengelolaan DAS
- Peningkatan produksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu dan ekspor
- Peningkatan nilai devisa dan PNBP
- Penurunan hotspot
- Peningkatan populasi spesies terancam punah
- Peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak

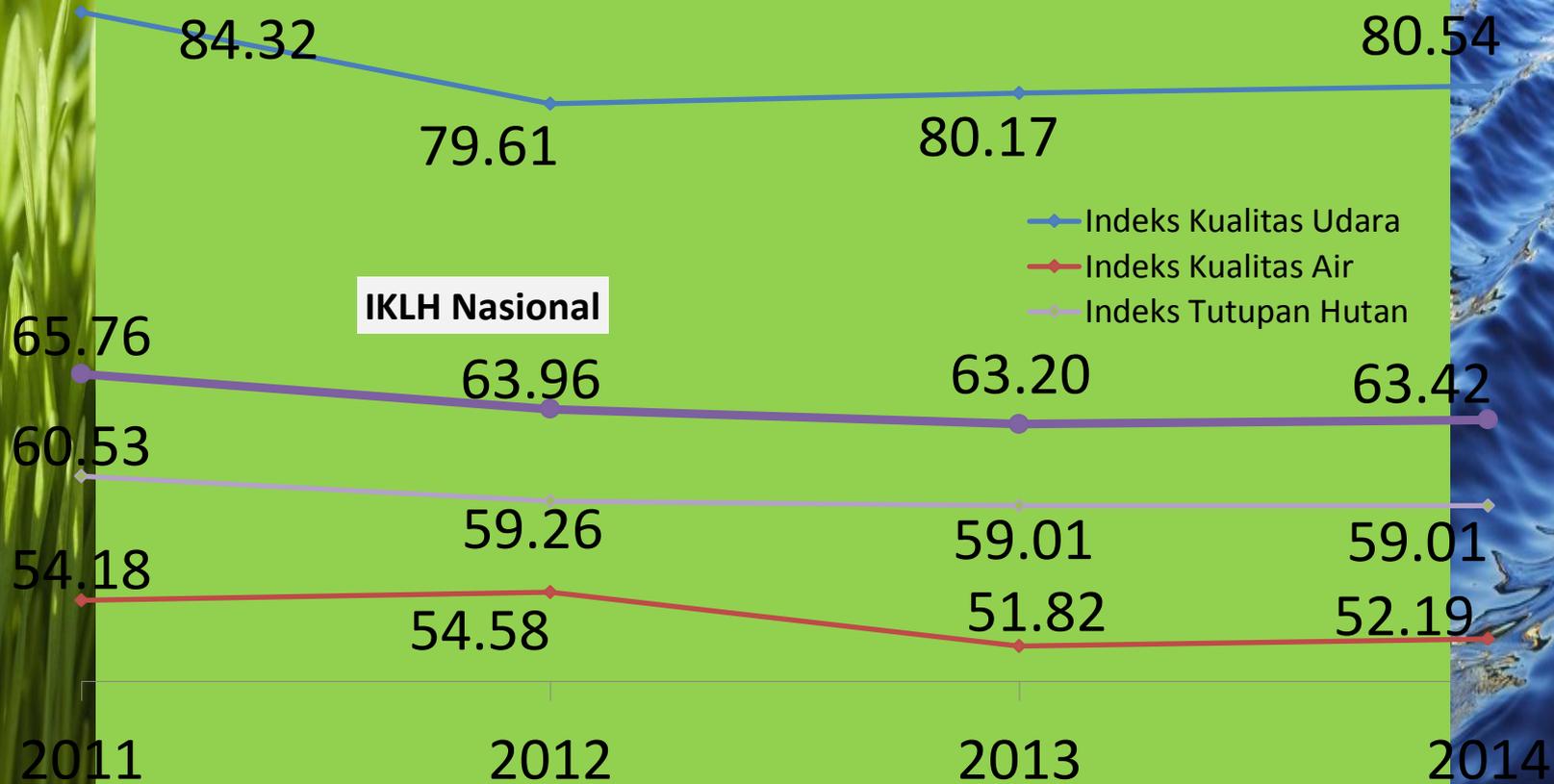
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

- Nilai IKLH dikeluarkan setiap tanggal 5 Juni (Peringatan HLH)
- Manfaat IKLH
 - Pemerintah : Decision making process, benchmark
 - Masyarakat : Informasi kondisi lingkungan dan kinerja pemerintah
- IKLH telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2015 (Perpres 43/2014) – **64,5** pada tahun 2015
- IKLH telah menjadi indikator RPJMN 2015-2019

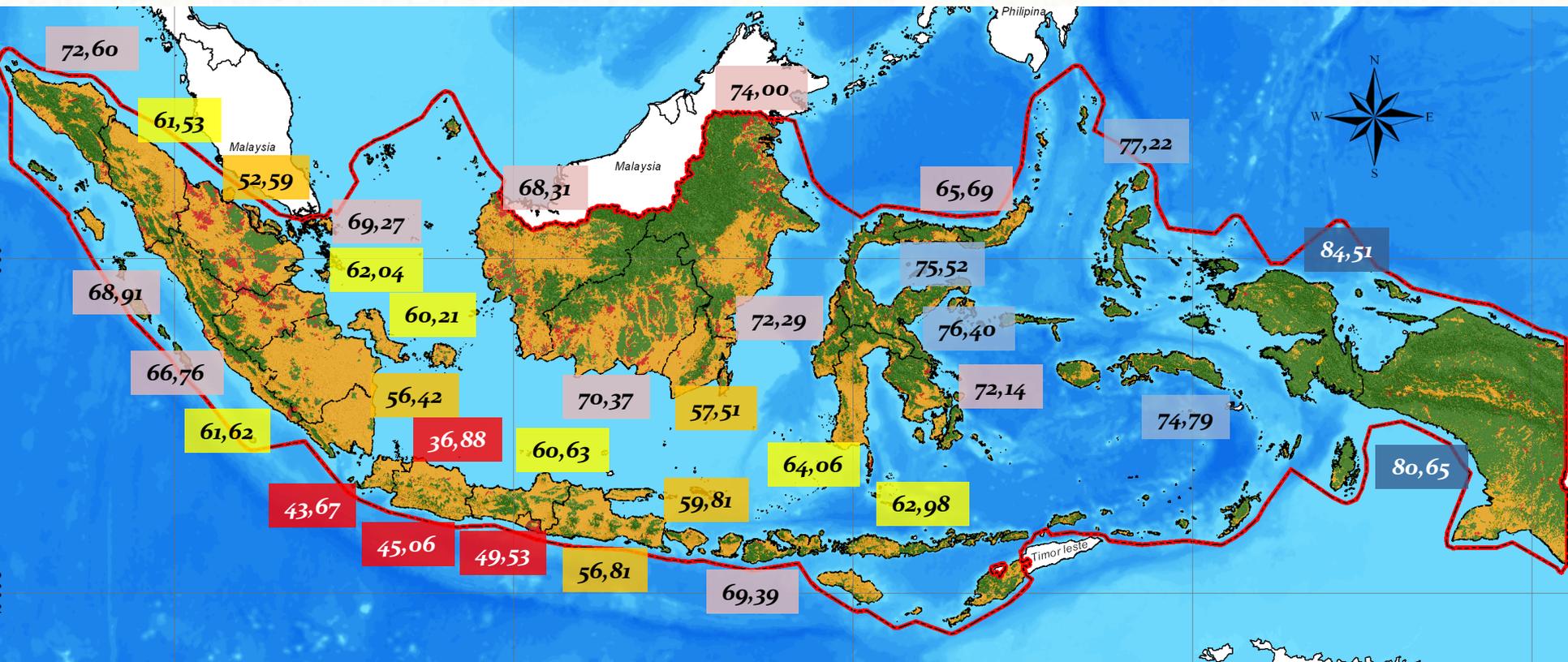
PEMBANGUNAN	BASELINE 2014	SASARAN
Penurunan emisi rumah kaca	15,5%	26%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63-64	66,5-68,5
Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta (termasuk dalam dan luar kawasan)	750 ribu ha (dalam kawasan)

- IKLH sudah digunakan RPJMD
 1. Perda : Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat
 2. Renstra : 82 : Provinsi Kalimantan Timur 2018

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2011 - 2013



Sebaran Provinsi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2014



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2011 - 2014

No	Provinsi	Indeks Udara 2011	Indeks Air 2011	Indeks Tutupan Hutan 2011	IKLH 2011	Indeks Udara 2012	Indeks Air 2012	Indeks Tutupan Hutan 2012	IKLH 2012	Indeks Udara 2013	Indeks Air 2013	Indeks Tutupan Hutan 2013	IKLH 2013	Indeks Udara 2014	Indeks Air 2014	Indeks Tutupan Hutan 2014	IKLH 2014
1	Aceh	90.96	53.68	75.06	73.42	89.65	57.00	72.67	73.06	91.28	51.54	72.17	71.72	91.20	54.57	72.17	72.60
2	Sumatera Utara	89.60	60.19	47.20	63.82	85.50	62.00	46.15	62.71	87.81	60.67	45.89	62.90	87.23	56.67	45.89	61.53
3	Sumatera Barat	91.05	61.90	67.24	72.78	86.02	59.29	65.51	69.80	86.41	52.71	65.13	67.79	89.16	53.71	65.13	68.91
4	Riau	67.07	55.60	60.49	61.00	51.91	54.30	50.65	52.12	52.89	48.71	50.60	50.72	60.30	47.53	50.60	52.59
5	Jambi	90.33	58.86	51.85	65.50	84.49	55.00	48.77	61.36	85.46	51.00	47.09	59.77	91.26	52.75	47.09	62.04
6	Sumatera Selatan	89.34	60.80	34.52	58.85	84.06	55.00	37.54	56.73	83.86	63.20	37.47	59.10	89.25	66.19	37.47	61.62
7	Bengkulu	87.80	64.10	59.14	69.23	87.26	57.40	55.66	65.66	87.61	64.12	55.03	67.53	86.48	62.67	55.03	66.76
8	Lampung	87.23	62.96	30.19	57.13	78.44	53.29	30.96	51.90	79.19	62.00	30.92	54.72	85.98	60.86	30.92	56.42
9	Bangka Belitung	89.52	61.85	39.44	61.19	83.93	59.50	36.76	57.73	84.36	64.25	36.77	59.29	90.39	61.30	36.77	60.21
10	Kepulauan Riau	90.82	60.88	57.23	68.40	89.46	61.00	53.63	66.59	94.45	58.67	53.30	67.26	95.53	64.29	53.30	69.27
Indeks Nasional		84.32	54.18	60.53	65.76	79.61	54.58	59.26	63.96	80.17	51.82	59.01	63.20	80.54	52.19	59.01	63.42

Margin Error	IPU	IPA	ITH	IKLH
Nasional	3.01	1.05	0.76	0.65
Provinsi	4.28	2.93	1.40	1.84

Unggul		X	>	90	
Sangat baik	82	<	X	≤	90
Baik	74	<	X	≤	82
Cukup	66	≤	X	≤	74
Kurang	58	≤	X	<	66
Sangat Kurang	50	≤	X	<	58
Waspada		X	<	50	

Kontribusi Tutupan Hutan terhadap IKLH



- Luas Wilayah Daratan Indonesia : 192,4 juta Ha
- Luas Tutupan Hutan 2012 : 97,2 juta Ha
- Peningkatan **1 point IKLH Nasional** setara penambahan Tutupan Hutan sebesar **± 2 juta Ha**



Terimakasih

